

**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**



**RANCANGAN AKHIR
RENCANA KERJA
TA. 2022**



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas Rahmat dan Hidayah-NYA, Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 telah selesai disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 ini dijadikan acuan dalam membuat Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022 untuk bahan penyusunan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan sebagai pedoman dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj).

Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran sangat kami harapkan untuk perbaikan dimasa yang akan datang dan kami ucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja ini.

Kuala Tungkal,

2021

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,



H.R. GATOT SUWARSO, SH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19631017 199003 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB. I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB. II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA	
2.1. Evaluasi Renja sampai dengan Tahun 2020	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BKPSDM.....	14
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi BKPSDM	16
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	17
BAB. III TUJUAN DAN SASARAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	25
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BKPSDM	25
BAB. IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKPSDM	
4.1. Program dan Kegiatan	26
BAB. V PENUTUP	37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan dijadikan acuan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun ke depan;

Rancangan Akhir Rencana Kerja OPD merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan OPD khususnya, dan pembangunan daerah umumnya. Rancangan Akhir Rencana Kerja OPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena Rancangan Akhir Rencana Kerja OPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Unit OPD adalah unit pemberi masukan utama bagi penyusunan dokumen RKPD, RPJMD, bahkan RPJPD. Rancangan Akhir Rencana Kerja OPD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah daerah. Kualitas penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja OPD sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan publik.

Pengembangan Kabupaten tidak lepas dari peran serta seluruh pemangku kepentingan antara lain Pemerintah Daerah, masyarakat dan swasta. Komitmen bersama dan konsistensi dalam melaksanakan pembangunan merupakan modal utama untuk mewujudkan harapan tersebut. Untuk mewujudkan harapan itu dibutuhkan perencanaan pembangunan yang baik.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 70 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah di Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan. Oleh karenanya sebagai konsekuensi logis untuk mewujudkan kinerja aparatur handal dalam menghadapi tuntutan masyarakat atas pelayanan yang tepat, mudah, transparan dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan administrasi dalam lingkungan BKPSDMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat diperlukan perencanaan yang benar-benar tepat guna dan terarah, dimana perencanaan merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan pembangunan dengan menetapkan pilihan yang berbasis pada kendala dan mencapai tujuan dalam waktu tertentu. Perencanaan yang baik harus berbasis kepada potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia serta sumber pendapatan daerah yang potensial yang dimiliki suatu daerah. Kemudian untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif dibidang perencanaan pembangunan daerah diperlukan tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan.

Dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 terutama berpedoman kepada Permendagri 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, dan Kepmendagri 050-3708 tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dengan mengakomodasi aspirasi yang berkembang di masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

Selanjutnya Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 disusun secara terpadu, partisipatif dan demokratis yang digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) BKPSDM, untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Tanjung Jabung Barat.

1.2 Landasan Hukum

Dalam melaksanakan seluruh kegiatannya, selain mengacu pada peraturan perundang-undangan kepegawaian, pelatihan dan pendidikan sumber daya aparatur, BKPSDM Kab. Tanjung Jabung Barat juga berpedoman pada peraturan perundang-undangan atau landasan hukum yang berlaku, yaitu :

1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Bagian Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-undang nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas kolusi, korupsi dan nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

- (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
 7. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 12. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Permendagri 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah
18. Kepmendagri 050-3708 tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah
19. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tanjung Jabung Barat;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 – 2033;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2006 Nomor 23);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
24. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 70 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Tanjung Jabung Barat tahun 2022 adalah melaksanakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan maupun pengawasan program/kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis.

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 dengan tujuan untuk dapat dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang Kepegawaian Derah 1 (satu) tahun kedepan agar terarah, efektif, efisien, dan terukur.

1.4 Sistematika Penulisan

Dalam proses penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja OPD mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sistematika Penulisan dokumen Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut:

BAB. I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB. II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA

- 2.1 Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan IV
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BKPSDM

- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKPSDM
- 2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD

BAB. III TUJUAN DAN SASARAN BKPSDM

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BKPSDM
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB. IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKPSDM

BAB. V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA

2.1 Evaluasi Renja sampai dengan Tahun 2020

Untuk mengetahui pelaksanaan rencana kerja (Renja Akhir) sampai dengan Tahun 2020, maka dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja Badan Kepegawaian Daerah dengan cara menghitung penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dimaksud mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan target kinerja capaian program, Selanjutnya dilakukan evaluasi kinerja dari pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Daerah.

Pada Tahun 2020 Program Prioritas Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri dari 2 Program antara lain Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur dengan Sumber Dana dari APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Adapun evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sampai dengan tahun 2020, dapat dilihat pada tabel evaluasi dibawah ini:

TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH S/D TRIWULAN IV TAHUN 2020
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan Renja BKPSDM tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA BKPSDM s/d 2021	
					Target Renja BKPSDM tahun 2020	Realisasi Renja BKPSDM s/d Triwulan IV Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA (%)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
1	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Terlaksananya jasa surat menyurat (Bulan)	72	48	12	12	100	12	72	100
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya pemakaian Telepon, Air dan Listrik (Bulan)	72	48	12	12	100	12	72	100
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Administrasi keuangan yang tertib (Bulan)	72	48	12	12	100	12	72	100

4	Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	Terpeliharanya kebersihan kantor (Bulan)	72	48	12	12	100	12	72	100
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor (Bulan)	72	48	12	12	100	12	72	100
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya Barang Cetak dan Penggandaan (Bulan)	72	48	12	12	100	12	72	100
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan Instalasi listrik/ penerangan (Bulan)	72	48	12	12	100	12	72	100
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Bulan)	72	48	12	12	100	12	72	100
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum rapat dan tamu (Bulan)	72	48	12	12	100	12	72	100
10	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar dan Daerah	Tersedianya Koordinasi dan Konsultasi (Bulan)	72	48	12	12	100	12	72	100
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									
11	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor (%)	100	100	100	100	100	100	300	300
12	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor (%)	100	100	100	100	100	100	300	300

13	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Kendaraan Dinas dalam kondisi baik (Unit)	150	64	20	20	100	22	106	70.67
14	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor (%)	100	100	100	100	100	100	300	300
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan									
16	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja (Bulan)	72	48	12	12	100	12	72	100
17	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya laporan keuangan (Bulan)	72	48	12	12	100	12	72	100
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									
18	Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional	Meningkatnya Kapasitas Kepemimpinan Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (orang)		187	2	22	1100.00	10	219	#DIV/0!
19	Pendidikan dan Pelatihan Perjenjangan	Meningkatnya sumber daya manusia Aparatur CPNS (orang)	895	80	145	145	100.00	200	425	47.49

	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur									
20	Pengangkatan CPNS dalam Jabatan Fungsional Tertentu	Jumlah pengangkatan dalam Jabatan Fungsional PNS (orang)	1100	423	150	220	146.67	150	793	72.09
21	Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah ASN yang mendapatkan Penilaian Kinerja (orang)	750	311	1573	1126	71.58	150	1587	211.60
22	Panitia Seleksi Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Diangkatnya Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (orang)	72	129	10	0	0.00	4	133	184.72
23	Fasilitasi Pengelolaan Pembuatan KARIS/ KARSU/ KARPEG/ KARTU ASN dan Penghargaan ASN	Terbitnya Pengelolaan Pembuatan KARIS/ KARSU/ KARPEG/ KARTU ASN dan Penghargaan ASN serta Cuti Umroh dan Haji (orang)	3050	1155	1050	485	46.19	500	2140	70.16
24	Peningkatan dan Pembinaan Disiplin dan Pelayanan Status PNS Kab. Tanjab Barat	Meningkatnya pengetahuan PNS akan Peraturan perundang-undangan Kedisiplinan PNS (Kasus)	35	27	185	184	99.46	5	216	617.14

25	Pengangkatan CPNSD menjadi PNS dan Sumpah PNS	Terpenuhinya formasi PNSD dan Pengambilan Sumpah PNSD Kabupaten Tanjung Jabung Barat (orang)	2077	466	2703	3007	111.25	400	3873	186.47
26	Penyusunan Data dan Informasi Kepegawaian Kab. Tanjab Barat	Tersedianya data dan informasi kepegawaian yang mutakhir (Buku)	222	122	12	12	100	40	174	78.38
28	Seleksi Penerima Bantuan Beasiswa Pendidikan Tugas Belajar bagi PNS	Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Aparatur (Orang)	190	143	150	29	19.33	50	222	116.84
31	Peningkatan HUT Korps Pegawai Republik Indonesia	Terlaksananya kegiatan HUT bagi PNS/ Anggota KORPRI (%)	500	100	100	100	100	100	300	60

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BKPSDM

Analisis kinerja pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dilakukan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis. Secara umum Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. Dalam melaksanakan program dan kegiatan yang bersifat administratif maupun bersifat teknis secara proposional telah berjalan dengan baik. Indikator keberhasilan terhadap pelaksanaan tugas ini adalah adanya komitmen kerja yang baik antara Kepala Badan beserta bawahannya dan penguasaan di bidang tugas masing-masing pegawai dengan baik.

Capaian kinerja dibidang tersebut dapat digambarkan bahwa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dapat merealisasikan 2 (dua) Tujuan dan 2 (dua) Sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 serta dapat melaksanakan keseluruhan program dan kegiatan dengan kategori berhasil, meskipun masih ada beberapa capaian kinerja yang dalam pelaksanaannya ditemukan kendala atau permasalahan. Hal ini tergambar dalam table 2.2 pencapaian kinerja pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat, sebagai berikut:

TABEL 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Kode	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA Perangkat Daerah)	IKK	TARGET RENSTRA BKPSDM					REALISASI CAPAIAN					PROYEKSI	CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan pelatihan formal (%)	24,5		12,4	19,2	15,5	17,5	19,2	13	13,4	15,9	19,2	19,8	24,5	
2	Persentase Aparatur yang memenuhi Diklat Struktural (%)	48,9				27,9	40,9	44,9			27,9	28,6	32,2	48,9	
3	Persentase Kasus Pelanggaran Disiplin yang terselesaikan (%)	90		90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	
4	Persentase Aparatur yang memenuhi Standar Kompetensi (%)	85		73	76	79	79	85	70	71,7	77,7	80,4	80,8	85	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKPSDM

Pada hakikatnya, isu merupakan suatu gambaran wacana yang masih diperdebatkan dan belum ditangani dan diolah secara optimal ke dalam suatu agenda pada lembaga tertentu. Kondisi ini dapat menimbulkan perbedaan persepsi yang bisa terjadi pada arah tujuan, cara, prinsip, lokasi, waktu dan kelompok - kelompok yang memperoleh keuntungan atau kerugian akibat dampak atau hasil pemecahan isu tersebut.

Terkait dengan hal tersebut, tuntutan terhadap pelaksanaan manajemen SDM aparatur juga telah terjadi pergeseran. Saat ini, sebagian besar masyarakat menginginkan suatu bentuk pelayanan yang cepat, tepat dan berkualitas dari aparatur. Untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat dan berkualitas tersebut, tentu saja dipengaruhi oleh kualitas, kompetensi dan tingkat kesejahteraan aparatur tersebut. Namun yang paling penting untuk mewujudkan hal tersebut, adalah kemauan yang kuat dari semua pihak, untuk bersama-sama memperbaiki pelayanan.

Dengan demikian, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai lembaga teknis yang memiliki tugas membantu Kepala Daerah dalam proses pelaksanaan manajemen kepegawaian, juga berkaitan erat dengan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD. Isu - isu penting yang berkaitan dengan BKPSDM adalah sebagai berikut :

- a. Optimalisasi manajemen kepegawaian dalam peningkatan profesionalisme ASN
- b. Pendayagunaan aparatur yang telah mengikuti diklat teknis dan fungsional belum sesuai dengan yang diharapkan
- c. Motivasi ASN untuk mengembangkan potensi dan kompetensi dirinya belum terwujud
- d. Pemanfaatan Manajemen Teknologi Informasi dalam pelayanan kepegawaian belum secara maksimal dilaksanakan
- e. Penempatan Aparatur sesuai kemampuan dan kompetensi Aparatur
- f. Tingkat disiplin Aparatur yang masih rendah dan belum memahami tentang tugas dan fungsinya sebagai aparatur

Isu-isu penting diatas mengisyaratkan perlunya meletakkan peningkatan pembinaan dan pengembangan PNS menjadi program prioritas dalam menyiapkan kesiapan aparatur daerah dalam menghadapi perubahan di era reformasi birokrasi ini.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode satu tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP Nasional, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/ kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan rancangan awal RKPD.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan hasil musyawarah dari beberapa tingkatan mulai dari desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten dan Kota yang menjadi acuan suatu program atau kegiatan pada tahun mendatang.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat bertujuan menata pemerintah yang bersih dan professional dengan pengelolaan keuangan dan asset daerah secara efektif, efisien, terbuka dan akuntabel disamping itu juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan dilandasi rasa aman, tenang dan sejahtera, maka dari itu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat harus lebih meningkatkan kinerja dan pelayanan prima kepada semua kalangan instansi pemerintah maupun masyarakat umum.

TABEL 2.4
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2022
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING	
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA		
1	2		3	5	6	7	8	9	10	11	12	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA					1,348,808,476	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA					1,348,808,476
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Meningkatnya persentase perangkat daerah dengan nilai AKIP "B"		43,175,000	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Meningkatnya persentase perangkat daerah dengan nilai AKIP "B"		43,175,000		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	BKPSDM	Tersusunnya Dokumen Renstra, Renja, RKA, LPPK, Lakip dan LPPD	12 Bulan	43,175,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	BKPSDM	Tersusunnya Dokumen Renstra, Renja, RKA, LPPK, Lakip dan LPPD	12 Bulan	43,175,000		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				51,975,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				51,975,000		

	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	BKPSDM	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan	12 Bulan	51,975,000	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	BKPSDM	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan	12 Bulan	51,975,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Berjalannya Kegiatan Administrasi Perkantoran dengan lancar	100%	1,253,658,476	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Berjalannya Kegiatan Administrasi Perkantoran dengan lancar	100%	1,253,658,476	
	Penyediaan Jasa Surat menyurat	BKPSDM	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	5,500,000	Penyediaan Jasa Surat menyurat	BKPSDM	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	5,500,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BKPSDM	Tersedianya kebutuhan belanja jasa Telepon, Air dan Listrik	12 Bulan	58,080,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BKPSDM	Tersedianya kebutuhan belanja jasa Telepon, Air dan Listrik	12 Bulan	58,080,000	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	BKPSDM	Tersedianya Laporan Keuangan	12 Bulan	196,955,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	BKPSDM	Tersedianya Laporan Keuangan	12 Bulan	196,955,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BKPSDM	Tersedianya Alat Kebersihan Kantor	12 Bulan	62,779,891	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BKPSDM	Tersedianya Alat Kebersihan Kantor	12 Bulan	62,779,891	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BKPSDM	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	83,905,019	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BKPSDM	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	83,905,019	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BKPSDM	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	28,820,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BKPSDM	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	28,820,000	

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	BKPSDM	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	6,629,260	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	BKPSDM	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	6,629,260	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	BKPSDM	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	5,940,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	BKPSDM	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	5,940,000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BKPSDM	Tersedianya kebutuhan makan dan minuman rapat tamu	12 Bulan	3,960,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BKPSDM	Tersedianya kebutuhan makan dan minuman rapat tamu	12 Bulan	3,960,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BKPSDM	Tersedianya kebutuhan akomodasi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 Bulan	459,533,106	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BKPSDM	Tersedianya kebutuhan akomodasi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 Bulan	459,533,106	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lain	BKPSDM	Terpeliharanya Gedung Kantor	12 Bulan	61,558,200	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lain	BKPSDM	Terpeliharanya Gedung Kantor	12 Bulan	61,558,200	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BKPSDM	Terpeliharanya kendaraan dinas/ Operasional	20 Unit	156,508,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	BKPSDM	Terpeliharanya kendaraan dinas/ Operasional	20 Unit	156,508,000	

						Jabatan					
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.	BKPSDM	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	34 Unit	21,890,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.	BKPSDM	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	34 Unit	21,890,000	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Perlengkapannya	BKPSDM	Tersedianya Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	150 Stel	28,600,000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Perlengkapannya	BKPSDM	Tersedianya Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	150 Stel	28,600,000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BKPSDM	Terlaksananya pengadaan peralatan dan mesin lainnya	40 Set	73,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BKPSDM	Terlaksananya pengadaan peralatan dan mesin lainnya	40 Set	73,000,000	
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		5,707,037,782	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		5,707,037,782	
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				621,940,000	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				621,940,000	
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	BKPSDM	Tersedianya data / informasi aparatur yang Valid dan update	12 Bulan	32,450,000	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	BKPSDM	Tersedianya data / informasi aparatur yang Valid dan update	12 Bulan	32,450,000	
	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	BKPSDM	Jumlah berkas Karis/ Karsu/ Karpeg/ Kartu ASN Dan Penghargaan ASN	1000 Orang	23,485,000	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	BKPSDM	Jumlah berkas Karis/ Karsu/ Karpeg/ Kartu ASN Dan Penghargaan ASN	1000 Orang	23,485,000	
	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk	BKPSDM	Jumlah Pengangkatan CPNS ke PNS dan	185 Orang	16,005,000	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis	BKPSDM	Jumlah Pengangkatan CPNS ke PNS dan	185 Orang	16,005,000	

	Pelaksanaan Pengadaan ASN		Sumpah PNS			dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN		Sumpah PNS			
	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	BKPSDM	Terlaksananya Rekrutmen PNS dan PPPK	4000 Orang	500,000,000	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	BKPSDM	Terlaksananya Rekrutmen PNS dan PPPK	4000 Orang	500,000,000	
	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	BKPSDM	Jumlah ASN yang difasilitasi	3 Orang	50,000,000	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	BKPSDM	Jumlah ASN yang difasilitasi	3 Orang	50,000,000	
	Mutasi dan Promosi ASN				230,702,500	Mutasi dan Promosi ASN				230,702,500	
	Pengelolaan Promosi ASN	BKPSDM	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang Terseleksi	28 Orang	180,702,500	Pengelolaan Promosi ASN	BKPSDM	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang Terseleksi	28 Orang	180,702,500	
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	BKPSDM	Terlaksananya Kenaikan Perangkat dalam 1 Tahun	500 Orang	50,000,000	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	BKPSDM	Terlaksananya Kenaikan Perangkat dalam 1 Tahun	500 Orang	50,000,000	
	Pengembangan Kompetensi ASN				4,690,042,782	Pengembangan Kompetensi ASN				4,690,042,782	

	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	BKPSDM	Jumlah Penerima Bantuan Beasiswa yang terseleksi	140 Orang	158,345,000	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	BKPSDM	Jumlah Penerima Bantuan Beasiswa yang terseleksi	140 Orang	158,345,000	
	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	BKPSDM	Jumlah peserta yang mengikuti Diklat fungsional	1 Paket	2,635,892,782	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	BKPSDM	Jumlah peserta yang mengikuti Diklat fungsional	1 Paket	2,635,892,782	
	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	BKPSDM	Jumlah peserta yang mengikuti Diklat Perjenjangan	173 Orang	1,860,000,000	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	BKPSDM	Jumlah peserta yang mengikuti Diklat Perjenjangan	173 Orang	1,860,000,000	
	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	BKPSDM	Jumlah pengangkatan dalam Jabatan Fungsional PNS	150 Orang	35,805,000	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	BKPSDM	Jumlah pengangkatan dalam Jabatan Fungsional PNS	150 Orang	35,805,000	
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				164,352,500	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				164,352,500	
	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPSDM	Jumlah ASN yang mendapatkan Penilaian Kinerja	1568 Orang	70,812,500	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPSDM	Jumlah ASN yang mendapatkan Penilaian Kinerja	1568 Orang	70,812,500	
	Pembinaan Disiplin ASN	BKPSDM	Jumlah kasus pelanggaran disiplin dan pelayanan status yang terselesaikan	17 Kasus 147 Orang	24,035,000	Pembinaan Disiplin ASN	BKPSDM	Jumlah kasus pelanggaran disiplin dan pelayanan status yang terselesaikan	17 Kasus 147 Orang	24,035,000	

	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	BKPSDM	Jumlah Izin Perceraian yang di Proses	8 Izin	40,000,000	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	BKPSDM	Jumlah Izin Perceraian yang di Proses	8 Izin	40,000,000	
	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	BKPSDM	Tingkat keberhasilan pelaksanaan HUT KORPS Pegawai Republik Indonesia	100%	29,505,000	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	BKPSDM	Tingkat keberhasilan pelaksanaan HUT KORPS Pegawai Republik Indonesia	100%	29,505,000	
					1,348,808,476					1,348,808,476	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pemerintah Pusat telah menetapkan beberapa kebijakan dalam rangka menata manajemen kepegawaian pada pemerintahan daerah. Kebijakan-kebijakan tersebut bertujuan terwujudnya SMART ASN, yaitu ASN sebagai human capital yang profesional, handal, berintegritas, sejahtera dan mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik sebagaimana diamanatkan pada Nawa Cita. Selain itu, untuk mendukung kebijakan pemerintah dibidang E-Government dan sebagai sarana pendukung pelaksanaan tugas-tugas dibidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia dibutuhkan pemanfaatan system informasi berbasis aplikasi, sehingga akan tercipta efektifitas dan efisiensi dalam mengelola administrasi kepegawaian di Pemerintah Daerah.

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja Akhir) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berpijak pada kebijakan nasional dalam melaksanakan program dan kegiatan, dimana semua program dan kegiatan yang dilaksanakan diharapkan sepenuhnya bisa mendukung program pemerintah pusat.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BKPSDM

Tujuan dan sasaran pada tahun 2022 masih dalam tahap penyusunan dokumen rencana strategis.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKPSDM

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasional yang harus dituangkan kedalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari Suatu Program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian Visi dan Misi Organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, proses, output, outcome maupun dampak sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

4.1. Program dan Kegiatan

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Tahun 2022 mempunyai 2 (Dua) program, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
2. Program Kepegawaian Daerah

Untuk menunjang program – program diatas, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyusun 7 (Tujuh) Kegiatan pada Tahun 2022 yaitu:

1. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Perlengkapannya
- Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

4. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Milik Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
- Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/ Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lain

7. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN

- Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
- Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK

8. Mutasi dan Promosi ASN

- Pengelolaan Promosi ASN
- Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN

9. Pengembangan Kompetensi ASN

- Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
- Pengelolaan Administasi Diklat dan Sertifikasi ASN
- Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
- Pembinaan Jabatan Fungsional ASN

10. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

- Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
- Pembinaan Disiplin ASN
- Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai
- Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai
- Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai

Adapun rencana kerja dan pendanaan Program dan Kegiatan Prioritas pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022:

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	NILAI SAKIP OPD	BKPSDM		9.700.171.110	APBD			10.670.188.221
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kelengkapan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	BKPSDM	100%	74.731.126	APBD		100%	85.940.795
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RENSTRA, RENJA, RKA dan DPA	BKPSDM	18 Dokumen	36.697.876	APBD		18 Dokumen	42.202.557
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Laporan LKj, LKPJ, LPPK, LPPD dan Evaluasi Kinerja	BKPSDM	15 Laporan	38.033.250	APBD		15 Laporan	43.738.238

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kelengkapan Dokumen Pelaporan Keuangan	BKPSDM	100%	8.501.738.373	APBD		100%	9.852.882.744
3	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan, dan Semesteran	BKPSDM	18 Laporan	34.791.500	APBD		18 Laporan	40.010.225
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah kebutuhan gaji dan tunjangan yang tersedia	BKPSDM	12 Bulan	8.291.336.873	APBD		12 Bulan	9.535.037.404
5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan Honorarium	BKPSDM	15 Orang	175.610.000	APBD		15 Orang	201.951.500
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BKPSDM	100%	65.985.752	APBD		100%	75.883.615
6	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Perlengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	BKPSDM	65 Stel	26.000.000	APBD		68 Stel	29.900.000
7	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sosialisasi atau Pelaksanaan Sosialisasi	BKPSDM	1 Kali	39.985.752	APBD		1 Kali	45.983.615

	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	BKPSDM		34.450.000	APBD		668.121.439
8	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan BMD OPD	BKPSDM	1 Laporan	34.450.000	APBD	1 Laporan	668.121.439
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	BKPSDM	100%	574.950.599	APBD	100%	661.193.189
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen penerangan kantor	BKPSDM	12 Bulan	6.024.565	APBD	12 Bulan	6.928.250
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	BKPSDM	12 Bulan	76.277.043	APBD	12 Bulan	711.268.389
11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang tersedia	BKPSDM	12 Bulan	17.600.000	APBD	12 Bulan	20.240.000
12	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia	BKPSDM	12 Bulan	38.797.641	APBD	12 Bulan	44.617.287
13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan	BKPSDM	12 Bulan	11.400.000	APBD	12 Bulan	13.110.000

		Peraturan Perundang-undangan yang tersedia							
14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi	BKPSDM	80 Paket	424.851.350	APBD		80 Paket	488.579.053
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BKPSDM	100%	120.845.260	APBD		100%	138.972.049
15	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah layanan surat menyurat yang tersedia	BKPSDM	12 Bulan	5.000.000	APBD		12 Bulan	5.750.000
16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Kebutuhan Belanja Jasa Telepon, Air dan Listrik yang tersedia	BKPSDM	12 Bulan	58.775.100	APBD		12 Bulan	633.627.184
17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Kebutuhan Alat Kebersihan Kantor	BKPSDM	12 Bulan	57.070.160	APBD		12 Bulan	65.630.684
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BKPSDM	100%	327.470.000	APBD		100%	376.590.500

18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan/ Operasional	BKPSDM	20 Unit	166.440.000	APBD		20 Unit	191.406.000
19	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	BKPSDM	22 Unit	25.030.000	APBD		34 Unit	28.784.500
20	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lain	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	BKPSDM	2 Unit	136.000.000	APBD		2 Unit	156.400.000
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Manajemen Kepegawaian	BKPSDM	100%	2.395.901.143	APBD		100%	2.755.286.314
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Bezzeting/ Formasi yang diusulkan	BKPSDM	500 Formasi	1.391.971.352	APBD		500 Formasi	1.600.767.055
21	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Tersedianya Data/ informasi aparatur yang Valid dan up to date	BKPSDM	12 Bulan	21.400.000	APBD		12 Bulan	24.610.000
22	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Peserta PNS dan PPPK yang terseleksi	BKPSDM	5000 Orang	1.370.571.352	APBD		4000 Orang	1.500.000.000
	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Mutasi dan Promosi yang di Proses	BKPSDM	520 Orang	314.876.475	APBD		528 Orang	362.107.946
23	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah ASN yang mengikuti seleksi Jabatan	BKPSDM	20 Orang	279.634.275	APBD		28 Orang	321.579.416

		Pimpinan Tinggi Pratama							
24	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Usul Kenaikan Pangkat yang di Proses dalam 1 Tahun	BKPSDM	500 Orang	35.242.200	APBD		500 Orang	40.528.530
	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Aparatur	BKPSDM	281 Orang	579.586.845	APBD		281 Orang	666.524.872
25	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah Izin Belajar dan Tugas Belajar yang di Proses	BKPSDM	40 Orang	103.598.250	APBD		40 Orang	119.137.988
		Jumlah peserta Pembekalan Pola Pembibitan Calon Taruna Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD)		50 Berkas				50 Berkas	
26	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah peserta yang mengikuti Diklat Teknis dan fungsional	BKPSDM	28 Orang	221.862.400	APBD		100 Orang	255.141.760
27	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah peserta yang mengikuti Diklat Perjenjangan	BKPSDM	9 Orang	199.061.500	APBD		14	228.920.725

28	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Pengangkatan, Kenaikan Jabatan, Pembebasan dan Pemberhentian dalam Jabatan Fungsional Tertentu	BKPSDM	150 Orang	55.064.695	APBD		150 Orang	63.324.399
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN yang mendapatkan Penilaian dan Evaluasi Kinerja	BKPSDM	4000 Orang	109.466.471	APBD		4000 Orang	125.886.442
29	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Pengangkatan dan Pelantikan PNS dalam Jabatan Struktural dan Mutasi PNS	BKPSDM	100 Orang	48.818.345	APBD		150 Orang	56.141.097
30	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah kasus pelanggaran disiplin yang terselesaikan	BKPSDM	5 Kasus					
		Jumlah Aparatur yang diangkat Sumpah PNS		163 Orang	22.677.876	APBD		5 Kasus	26.079.557
31	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Izin Perceraian yang di Proses	BKPSDM	12 Berkas	18.945.500	APBD		100 Berkas	21.787.325

32	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah berkas Tanda Jasa, KARIS/ KARSU, KARPEG dan Pensiun PNS yang diproses	BKPSDM	500 Berkas	19.024.750	APBD		250 Berkas	20.927.225
					12.096.072.253				13.425.474.535

BAB V

PENUTUP

Pencapaian keberhasilan kinerja instansi pemerintah dalam era yang semakin rumit dan kompleks ditengah perubahan yang semakin dinamis menuntut Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk terus mempersiapkan diri secara terus menerus kearah pembangunan yang sesuai dengan keinginan masyarakat dan kondisi daerah. Pembangunan dan pengembangan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kinerja instansi pemerintah yang berorientasi pada pencapaian hasil.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 ini merupakan Rencana Kerja Tahunan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan mengacu pada Permendagri 90 tahun 2019. tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, dan Kepmendagri 050-3708 tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah

Dengan adanya Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 maka penetapan prioritas pembangunan diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis sebagai perwujudan kinerja pemerintah yang baik dan akuntabel.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,


H.R. GATOT SUWARSO, SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19631017 199003 1 005